



BALI - Indonesia Climate Change Trust Fund telah menyelenggarakan kegiatan *Short Course Supply Chain Perikanan Tuna Longline dan Pencapaian Marine Stewardship Council (MSC) Certification*. Pelatihan ini dilaksanakan dengan pertemuan di kelas secara online dan offline serta melakukan kunjungan lapangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat di Nusa Dua, Bali pada tanggal 6-9 September 2021.

Pelatihan Nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas stakeholders terkait pengelolaan perikanan tuna untuk memenuhi standar sertifikasi produk yang meliputi praktik terbaik, model analisis, pengembangan dan simulasi untuk mendukung pelaksanaan RPJMN 2020-2024 terkait pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir dan laut.

Oleh karenanya untuk memperkuat Pemerintah Indonesia dalam strategi pemasaran dan pengelolaan Perikanan Tuna khususnya longline, maka ICCTF bersama dengan Kementerian PPN/Bappenas melalui program COREMAP-CTI ADB menyelenggarakan National Short Course Training untuk meningkatkan kapasitas pengelola perikanan di tingkat nasional dan provinsi serta pemangku kepentingan terkait lainnya tentang cara mengelola pemanfaatan komoditas tersebut secara efektif dan berkelanjutan.

Pelatihan yang telah dilaksanakan selama 4 hari ini mengeksplorasi pengetahuan tentang manajemen dan praktik terbaik Perikanan Tuna longline menuju sumber daya yang berkelanjutan dan terkelola dengan baik melalui peningkatan pemahaman dan penerapan pelaksanaan bycatch, e-logbook, observer, mekanisme pelaporan kepada Regional Fisheries Management Organizations (RFMO), dan modelling.

DIALOG PENERAPAN PERIKANAN BERKELANJUTAN DAN TERUKUR

Jakarta- Kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir ini menjadi salah satu perhatian utama pemerintah selain petani dan masyarakat rentan lainnya. Kebijakan yang berorientasi pengelolaan yang berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan berbasis science-based policy sangat diperlukan untuk menuju pengelolaan yang transparan, akuntabel dan mengakomodasi kompleksitas serta dinamika sumber daya dan usaha perikanan. Dalam konteks inilah ICCTF bersama Bappenas mendorong Penerapan Perikanan Berkelanjutan menjadi kebijakan perencanaan pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan.

“Bappenas telah menjadikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) sebagai basis dalam pembangunan perikanan berkelanjutan yang merupakan program prioritas dalam RPJMN 2020-2024”, ujar Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Sri Yanti, dalam keterangan tertulis pada Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur di Jakarta, Selasa (14/09/2021).



Direktur Eksekutif ICCTF Dr. Tonny Wagey bersama dengan Direktur Kelautan Perikanan dan Kelautan Bappenas Dr. Ir. Sri Yanti JS MPM dalam Dialog Penerapan Perikanan Berkelanjutan (Jakarta, 14 September 2021).

Untuk menunjang perencanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan yang berbasis ilmu pengetahuan (Science based policy), Bappenas melakukan beberapa kajian ilmiah seperti studi bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura (WPP 718), studi perikanan alat tangkap cantrang di perairan Utara Jawa meliputi Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai Jawa Timur (WPP 712). Salah satu studi lainnya yang tidak kalah penting dan sedang mulai kami rintis, yaitu studi supply chain perikanan Tuna di WPP 713 dan 573. Harapannya berbagai kajian ini dapat menjadi model percontohan dalam menyusun kebijakan sektor kelautan dan perikanan untuk berbagai jenis komoditas lainnya melalui pengelolaan yang transparan dan berbasis sains untuk mewujudkan perikanan berkelanjutan.

Sejalan dengan hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga telah mengeluarkan konsep penangkapan ikan terukur dalam mengelola sumber daya perikanan guna menjaga ekosistem laut dan pesisir yang sehat dan produktif, serta menjadikan Indonesia lebih makmur dari sisi ekonomi maupun sosial. “Kegiatan ekonomi harus seimbang dengan ekologi, sesuai arahan Pak Menteri Kelautan dan Perikanan. Di mana setiap aktivitas di ruang laut, harus memperhatikan kesehatan lautnya,” ujar Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini.



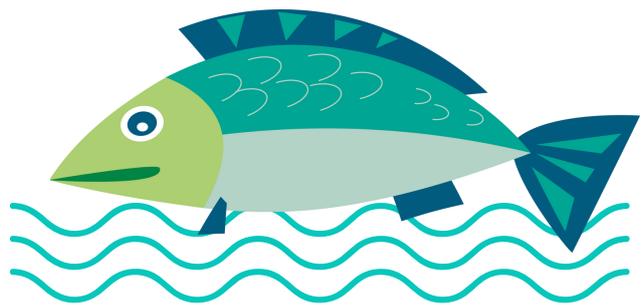
Seluruh Peserta Rapat Koordinasi Dialog
Penerapan Perikanan Berkelanjutan



Press Conference Dialog
Penerapan Perikanan Berkelanjutan

Dengan menggunakan pendekatan simulasi dinamika berbasis data hasil tangkapan dan parameter ekonomi lainnya, analisis bioekonomi perikanan udang di Laut Arafura menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan pengendalian input, dalam hal ini jumlah kapal optimal, yang diijinkan. Dari dua jenis tipe alat penangkapan udang yang dijadikan sampel mewakili mayoritas armada yang beroperasi, yakni armada dengan target udang putih dan udang dogol (banana prawn) serta target udang windu dan udang dogol (tiger prawn) diperkirakan perikanan ini memperoleh manfaat ekonomi per kapal antara Rp. 25 - 50 milyar per tahun.

Hasil Studi Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas

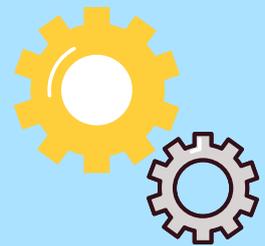


Untuk mencapai pemanfaatan ekonomi yang optimal ini diperlukan alokasi jumlah kapal yang optimal dengan kisaran 50 - 70 kapal dan secara gradual dievaluasi sesuai dengan kapasitas biologi udang di Laut Arafura. Dengan alokasi optimal sebesar itu, hasil simulasi menunjukkan bahwa potensi PNBP yang diperoleh per kapal akan mencapai Rp. 400 - 700 juta per tahun. "Bappenas juga ingin mendorong peningkatan Penerimaan Nasional Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Kelautan dan Perikanan, dari studi Bioekonomi ini juga kita bisa mensimulasikan berapa potensi yang bisa diterima negara", ujar Sri Yanti.



Pendekatan bioekonomi ini juga sedang dilakukan untuk perikanan cantrang, ditengah kebijakan penggantian alat tangkap cantrang yang didisinyalir memberikan nilai ekonomi yang tinggi namun dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan sumberdaya perikanan karena tingkat selektifitasnya yang rendah. Studi ini akan dilakukan secara mendalam tentang bagaimana pengelolaan yang baik untuk perikanan cantrang agar tidak menimbulkan kerusakan ekosistem, namun juga tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Sebagai tools, bioekonomi ini menjadi instrumen yang terbaik untuk mengukur kondisi stok ikan dan manfaat ekonomi optimum yg dapat diperoleh. Harapannya dari studi ini dapat disimpulkan apakah introduksi kebijakan baru tersebut dapat diterapkan dengan memberlakukan aturan pengelolaan dan pembatasan jumlah kapal yang berpegang pada keseimbangan ekologi dan ekonomi, yakni usulan jumlah kapal optimum (*optimum effort*). Selanjutnya, kajian bioekonomi ini direncanakan akan dilakukan untuk menunjang studi supply chain perikanan tuna, khususnya Tuna Longline yang akan mulai dilaksanakan pada akhir 2021.



Berbagai kajian bioekonomi ini masih terus akan disempurnakan seiring dengan ketersediaan data yang lebih komprehensif. Namun demikian, studi ini dapat menjadi acuan awal untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan yang berbasis kaidah-kaidah ilmiah yang transparan dan akuntabel. Harapannya perikanan berkelanjutan yang telah menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional ini dapat terwujud dimulai dari beberapa jenis komoditas utama di beberapa WPP tertentu sesuai karakteristiknya hingga mencakup jenis lainnya hingga ke seluruh penjuru Indonesia.

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur KKP

Langkah pertama dalam menerapkan konsep Penangkapan Ikan Terukur, yakni terlebih dahulu mengetahui kesehatan stok ikan di setiap WPP. Kemudian diatur jumlah ikan yang boleh ditangkap, jumlah kapal yang menangkap, termasuk alat tangkapnya. Dirjen Perikanan Tangkap KKP, Muhammad Zaini menambahkan, penerapan konsep penangkapan ikan terukur bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan di Indonesia.

Sebab nantinya pendaratan ikan tidak lagi berpusat di Pulau Jawa melainkan di pelabuhan-pelabuhan yang sudah ditentukan. Sehingga masyarakat setempat di luar Pulau Jawa akan dapat memperoleh nilai tambah dari hasil penangkapan beserta proses industrialisasi di hilir.

Saat ini KKP tengah menyiapkan infrastruktur pendukung termasuk ekosistem industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk infrastruktur skema yang diusulkan adalah melalui perbaikan fasilitas pelabuhan yang sudah ada dan membangun pelabuhan baru.

“Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 akan menjadi salah satu terjemahan dari penangkapan ikan terukur dalam bentuk kebijakan”, ujar Dirjen Zaini. Permen tersebut tidak hanya untuk kepentingan ekologi dan ekonomi, tapi juga menekan terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat hingga menjaga kedaulatan negara. Salah satu poin penting Permen ini adalah mengganti dan memodifikasi beberapa jenis alat tangkap ikan yang berpotensi memberi dampak negatif terhadap sumberdaya perikanan beserta lingkungan perairannya.

Hasil rekomendasi studi Bioekonomi yang dilakukan oleh Bappenas di WPP 718 Laut Aru-Arafura sangat membantu dalam menerapkan kebijakan Perikanan Terukur oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menuju pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Studi ini dapat menjadi model untuk pengelolaan beberapa jenis komoditas utama lainnya di 11 WPP sehingga memberikan kepastian berusaha di bidang perikanan dengan tidak mengganggu sumber daya perikanan oleh alat tangkap tertentu seperti jaring hela berkantong. Dengan demikian kekhawatiran sumber daya perikanan akan habis dapat dicegah.

Hasil studi inipun mendukung kebijakan pembayaran pungutan hasil perikanan (PHP) dari sebelum produksi menjadi pasca produksi sebagai insentif bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan untuk berproduksi lebih efisien. “Kami sangat menyambut baik bahwa rekomendasi studi bioekonomi perikanan yang dihasilkan Bappenas dapat digunakan sebagai alat (tool) dalam pelaksanaan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur yang diinisiasi KKP”, ujar Sri Yanti.

“KKP juga menyambut baik dan akan memanfaatkan hasil kajian bioekonomi dari Bappenas tersebut guna mewujudkan Penerapan Perikanan Berkelanjutan dan Terukur untuk dapat mewujudkan target PNPB Perikanan di 11 WPP mencapai Rp. 12 Triliun pada 2024”, tegas Zaini.



ICCTF & BAPPENAS RI TANAM MANGROVE DI PULAU NAMO GILI BALU, NUSA TENGGARA BARAT



Direktur Eksekutif ICCTF Dr. Tonny Wagey bersama dengan Direktur Kelautan Perikanan dan Kelautan Bappenas Dr. Ir. Sri Yanti JS MPM pada kegiatan Penanaman Mangrove serta Monitoring dan Evaluasi COREMAP-CTI ADB di Pulau Namo Gili Balu, NTT.

Gili Balu - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia / Bappenas, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, PT Sucofindo, dan PT. Cakra Buana Aghna beserta para mitra melaksanakan kegiatan penanaman mangrove di Pulau Namo, Gili Balu, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 16 September 2021.

Pelaksanaan rehabilitasi mangrove ini merupakan implementasi dari program Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) dengan dana hibah Asian Development Bank.

Kegiatan Penanaman Mangrove di Kawasan Konservasi Perairan Gili Balu, NTB ini diawali dengan Pembukaan dan Arahan oleh Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM selaku Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/ Bappenas. Kemudian dilanjutkan dengan Peresmian Penanaman Mangrove oleh Dr. Tonny Wagey Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF). Penanaman Mangrove di Pulau Namo, Gili Balu Nusa Tenggara Barat dilakukan secara simbolis oleh Bupati Sumbawa Barat bersama dengan Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas, Direktur Eksekutif ICCTF, Direktur Sucofindo serta stakeholder setempat.

Dr. Tonny Wagey selaku Direktur Eksekutif ICCTF melakukan Penanaman Mangrove di Pulau Namo, Gili Balu Nusa Tenggara Barat bersama para siswa dan siswi setempat sebagai bentuk motivasi guna mengajarkan peran penting Konservasi Sumber Daya Alam kepada para generasi muda.

Kawasan Perairan Gili Balu memiliki potensi ekosistem pesisir yang cukup lengkap, baik dari ekosistem terumbu karang, ekosistem lamun, ekosistem mangrove dan ekosistem pantai dan bebatuannya. Total luas area ekosistem mangrove di Kawasan Gili Balu adalah 568,2 Hektar, yang terdapat di Pulau Kalong, Pulau Namo, Pulau Kenawa, Pulau Paserang, Pulau Kambing dan Pulau Belang.

Tiga ekosistem di wilayah pesisir yaitu ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove dan ekosistem padang lamun sangat penting perannya, tidak saja dari sisi lingkungan hidup, tapi juga penting bagi perekonomian masyarakat, terutama nelayan dan pembudidaya ikan. Selain itu, juga menjadi sumber plasma nutfah, nursery ground, dari sisi fisik sebagai break water dan dari segi sosial budaya ekosistem pesisir juga merupakan bagian dari kerarifan lokal yang tumbuh berkembang dan dijaga oleh masyarakat pesisir. Oleh karena itu, ekosistem tersebut harus dijaga bersama.

“Kesadaran masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi dan keberadaan ekosistem mangrove masih perlu ditingkatkan. Untuk itu perlu upaya rehabilitasi salah satunya melalui penanaman mangrove. Upaya dari COREMAP-CTI ini tentu saja perlu didukung dari pemerintah dan masyarakat Sumbawa Barat, mulai dari kesiapan lahan, keberlanjutan pengelolaan atas infrastruktur atau sarana dan prasarana, keberlanjutan untuk menjaga ekosistem, dan kegiatan lain di daerah yang saling melengkapi,” pesan Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM selaku Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas dalam kegiatan rehabilitasi mangrove di Pulau Namo.

Hutan mangrove atau hutan bakau di Gili Balu memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat terutama masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, antara lain sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat, karena menghasilkan berbagai produk bernilai ekonomi terutama sebagai penghasil produk kayu, ikan, kerang, kepiting dan lain-lain serta dapat dijadikan sebagai kawasan wisata alam maupun untuk pendidikan. Di beberapa daerah, peranan ini berkurang, akibat kerusakan ekosistem mangrove dan menurunnya kualitas lingkungan pesisir. Mangrove merupakan salah satu bentuk ekosistem hutan yang unik dan khas serta terdapat pada daerah pasang surut di wilayah pesisir, pantai, dan atau pulau-pulau kecil dan merupakan potensi sumber daya alam yang sangat potensial. Hutan mangrove memiliki nilai ekonomi dan ekologis yang sangat tinggi, tetapi sangat rentan terhadap kerusakan apabila kurang bijaksana dalam mengelola dan melestarikannya.

Hasil survei awal oleh PT Sucofindo yang dilakukan pada Maret 2021 menunjukkan bahwa kondisi mangrove di Gili Balu relatif bagus, walaupun ada beberapa yang perlu direstorasi, agar lebih baik dan dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal. Kerjasama dan peran serta masyarakat yang lebih tinggi dan maksimal sangat dibutuhkan. Jumlah bibit mangrove yang akan ditanam sekitar 25.000. Persiapan bibit, penanaman dan pemeliharaan melibatkan masyarakat setempat. Sebelumnya PT. Sucofindo (Persero) yang menjadi pelaksana Paket 6 COREMAP-CTI dana hibah ADB telah melakukan pelatihan mengenai Mangrove selama 2 hari, bekerjasama dengan Yayasan Olah Hidup (LOH) Sumbawa, yang diikuti oleh perwakilan masyarakat dari 4 desa, yaitu Desa Poto Tano, Senayan, Tuananga, dan Kiantar. Peranan unsur masyarakat termasuk perempuan juga didorong dalam kegiatan COREMAP-CTI ini dengan melibatkan sebanyak 30% perempuan dalam pelatihan. Setelah pelatihan dan praktek, masyarakat diberdayakan untuk melakukan pembibitan dan penanaman, kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan. Puncak acara penanaman dilaksanakan pada tanggal 16 September 2021 di Pulau Namo dan Pulau Kalong.

Puncak acara penanaman mangrove di Pulau Namo juga dihadiri oleh Bupati Sumbawa Barat Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M. Beliau menyampaikan, bahwa walaupun kewenangan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, akan tetapi pendampingan dan pembinaan tetap dilakukan sesuai kewenangan yang ada, karena masyarakat pesisir menjadi masyarakatnya Kabupaten Sumbawa Barat. Beliau berharap masyarakat menjaga ekosistem dengan baik.

Selain Mangrove, diharapkan juga memperhatikan **Padang Lamun dan ekosistem terumbu karang** yang juga sangat potensial. “Indonesia memiliki luas kawasan mangrove terbesar di dunia, dimana ekosistem mangrove dan lamun ini memiliki kemampuan menyerap karbon dari gas rumah kaca (blue carbon) yang berperan sangat penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Menjaga ekosistem karbon biru ini juga sejalan dengan strategi yang sedang disusun oleh ICCTF yakni Indonesia Blue Carbon Strategy Framework (IBCSF),” ujar Direktur Eksekutif ICCTF, Dr. Tony Wagey.

PRODUKSI MEDIA DIGITAL PODCAST



Produksi media digital secara audio berupa Podcast yang juga dilakukan untuk mendukung kegiatan kampanye program COREMAP-CTI, produksi ini bekerja sama dengan mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank melalui **Podcast Cerita dari Laut**.



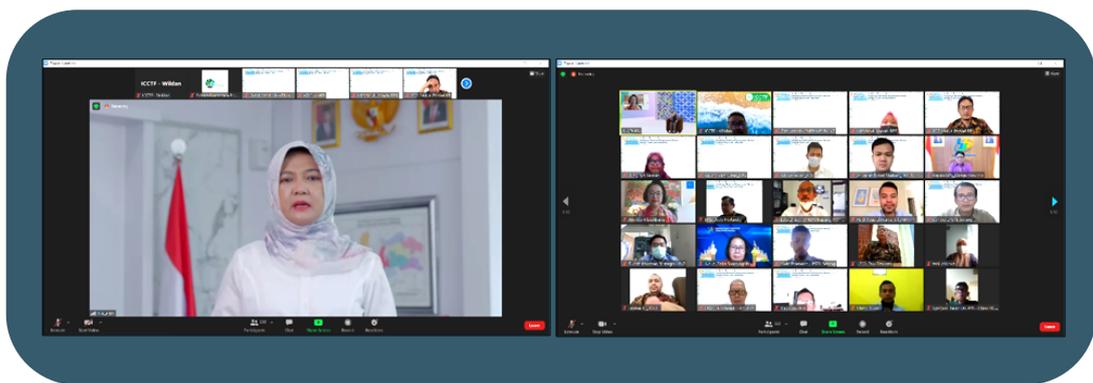


PERAYAAN HARI MARITIM NASIONAL



Pada tanggal 23 September 2021, ICCTF mengikuti undangan Perayaan Hari Maritim Nasional. Kegiatan pada acara ini meliputi Pemutaran video seni dan budaya, Pemutaran Ucapan Selamat Hari Maritim Nasional ke-57 dari para akademisi dan pimpinan BUMN, serta Pemutaran film Sejarah dan Konsep Hari Maritim Nasional. Dalam acara ini, **Deputi Bidang KSDA Bappenas, Arifin Rudiyanto, mewakili Menteri PPN/Bappenas menyampaikan Pidato pengenal mengenai Arah Pembangunan Maritim Indonesia. Beliau menjelaskan mengenai pentingnya budaya maritim yang kuat untuk perkembangan bahari, mengoptimalkan kelautan, dan perlunya upaya pembangunan dari hulu-hilir.** Strategi utamanya adalah dengan cara memperkuat politik maritim dan ekonomi maritim melalui inisiatif strategik seperti NKRI sebagai Poros Maritim Dunia, memperkuat pertahanan maritim di Asia Timur, Penguasaan SDA migas, perikanan, wisata dengan dukungan sarana dan prasarana, serta mengoptimalkan konektivitas kelautan.

LOKAKARYA NASIONAL PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA LAUT INDONESIA



Pada tanggal 23 September 2021, ICCTF mengikuti undangan Loknas Penyusunan Neraca Sumber Daya Laut (SDL) Indonesia. Dari pertemuan ini, diharapkan seluruh peserta mendapatkan informasi terkini tentang kebijakan dan program pembangunan yang mendukung penyusunan ocean account di Indonesia. Sebagaimana diketahui, **Neraca SDL mendukung penerapan prinsip blue economy. Penerapan Neraca SDL ini juga mendukung UU no. 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Pendekatan digunakan sebagai indikator antara keberlanjutan ekonomi dan ekologi laut.** Namun karena neraca SDL adalah hal yang relatif baru dalam bidang Keautan dan Perikanan, ada sejumlah tantangan seperti luasnya wilayah perairan, pendanaan, sumberdaya tenaga dan waktu, serta ketersediaan data. Selain itu bagaimana memproyeksikan nilai tersebut secara *accountable* karena kekayaan tersebut sebagian besar dalam bentuk potensi.



SUPPORTING THE INDONESIAN GOVERNMENT FOR A BETTER CLIMATE




www.icctf.or.id

 Indonesia Climate Change Trust Fund
 ICCTFofficial
 ICCTF_ID
 ICCTFofficial

Lippo Kuningan 15th Floor Unit D-E
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta 1
 2940, Indonesia
 Phone: (+62 21) 80679386 (Hunting)
 Fax : (+62 21) 80679387
 Email: secretariat@icctf.or.id

